

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Republik Indonesia Serikat tidak terlepas dari Perjanjian Linggarjati yang resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Pemerintah memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda. Hasil dari Perjanjian ini adalah Indonesia mendapatkan pengakuan secara *de facto* atas Jawa, Sumatera dan Madura. Perjanjian Linggarjati tidak mampu menghilangkan rasa curiga terhadap Belanda. Setelah disahkannya Perjanjian Linggarjati Belanda kemudian menduduki Bogor yang menyebabkan rusaknya kepercayaan rakyat terhadap Perjanjian tersebut (Tasnuri & Rijal Fadli, 2019: 62).

Menurut Tcokropranolo dalam Tasnuri & Rijal Fadli (2019: 62) Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Belanda. Ketidakberhasilan ini menjadi alasan Dr. Louis Beel memberikan kekuasaan penuh kepada Van Mook untuk melakukan aksi militer. Hal ini dilakukannya karena menganggap Indonesia melanggar isi dari Perjanjian Linggarjati.

Van Mook melakukan agresi militer I yang berlangsung pada tanggal 21 Juli-5 Agustus 1947. Tujuan aksi ini adalah untuk menduduki wilayah Jawa Barat, perluasan daerah-daerah yang telah didudukinya seperti Semarang dan Surabaya,

serta pendudukan di daerah-daerah perkebunan dan penghasil minyak seperti Deli, Palembang dan sekitarnya (Gde Agung, 1985: 45).

PBB yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia dan Belgia membantu perundingan Belanda-Indonesia untuk mencapai gencatan senjata yang baru. Setelah disepakatinya Perjanjian Renville, Belanda kembali mengencarkan pembentukan negara-negara federal dibawah kekuasaannya. Sementara itu, kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara *de facto* berkurang dan merugikan Indonesia. Perjanjian Renville nyatanya tidak menyelesaikan konflik Belanda-Indonesia, perundingan-perundingan terus dilakukan dan dalam proses perjalanan perundingan menemui titik buntu sehingga menjadi alasan Belanda melakukan Agresi militer II pada tanggal 19 September 1948 (Tasnuri & Rijal Fadli, 2019: 64).

Agresi militer Belanda yang dilakukan ke ibukota Yogyakarta berhasil menahan Sukarno, Hatta, Syahrir dan H. Agus Salim yang kemudian diasingkan ke Prapat dan Bangka. Untuk mempertahankan pemerintah RI maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Pada tanggal 1 maret 1949 sebagai aksi balasan pihak militer mengadakan serangan umum ke wilayah ibu kota. Salah satu penyebab serangan umum adalah tidak dihiraukannya resolusi PBB yang keluar pada tanggal 28 Januari 1949 yang menyatakan sebelum tanggal 1 Januari 1950 Indonesia harus mendapatkan kedaulatan penuh.

Belanda yang mendapat tekanan dari dunia internasional maka pada tanggal 7 Mei 1949 pihak Belanda yang diwakili oleh Van Roijen bersedia mengadakan perundingan yang dilaksanakan di Hotel des Indes bersama pihak Indonesia yang diwakili Moh. Roem. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan Perjanjian Roem-Roijen yang intinya mengenai penyelesaian konflik Belanda-Indonesia yang akan dibahas dalam Konferensi Meja Bundar (Tasnuri & Rijal Fadli, 2019: 64).

Pada tanggal 23 Agustus 1949, Belanda menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Indonesia diwakili oleh panitia pusat yakni Drs. Moh. Hatta. Dalam Konferensi Meja Bundar, pihak Belanda atas desakan anggota-anggota PBB, RI dan BFO menyepakati pengakuan secara *de jure* dan *de facto* terhadap Indonesia dan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai bentuk realisasi kesepakatan dalam KMB maka pihak Belanda memberikan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) (Tasnuri & Rijal Fadli, 2019: 65).

Setelah penyerahan kedaulatan 1949 suasana semakin membaik, masalah dibidang keamanan dan ketertiban sudah dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Republik Indonesia Serikat yang berdiri sesuai keputusan dalam KMB memutuskan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 16 negara bagian atau negara-negara federal yaitu: Negara Pasundan, Republik Indonesia, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, Negara Riau, Negara Jawa Tengah, Negara Dayak Besar, Negara Bangka, Negara Belitung, Negara Kalimantan Timur,

Negara Kalimantan Barat, Negara Kalimantan Tenggara, dan Negara Banjar. Dalam perjalanannya negara-negara tersebut memutuskan kembali menjadi bentuk kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) juga memiliki dampak bagi Negara Sumatera Timur sebagai salah satu dari negara bagiannya. Hal ini diperlihatkan dari pemberitaan media massa yang terbit di negara bagian tersebut. Adanya media massa yang memberikan respon terhadap berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Berbagai macam respon baik itu pro ataupun kontra dapat dilihat dari isi pemberitaan media massa tersebut. Beberapa media massa yang turut memberikan tanggapan terhadap berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe*.

Pers merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Surat kabar dan majalah merupakan bagian dari pers itu sendiri. Surat kabar dan majalah umumnya menyajikan berbagai peristiwa di kehidupan masyarakat baik dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pers sebagai media dalam menyajikan berita dan menyampaikan pendapat semakin tumbuh dan berkembang dengan sangat luas.

Pers yang berkembang sebagai wadah menyampaikan pendapat terhadap suatu keadaan yang menjadi perhatian bagi khalayak. Sehingga pers berperan dalam pemberitaan mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS). Selain itu, banyaknya penelitian terdahulu mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS), maka penulis merasa tertarik untuk meneliti respon media terhadap Republik Indonesia

Serikat (RIS). Dalam hal ini penulis ingin meneliti beberapa surat kabar dan majalah yang terbit di Kota Medan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Beberapa surat kabar maupun majalah yang akan penulis teliti merupakan koleksi dari Rumah Sejarah Medan (RSM) dan Kantor Surat Kabar Harian Umum Waspada Medan. Terdapat dua (2) media massa yang memberi respon terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe* (Siregar: 2019). Media massa inilah yang nantinya akan ditelaah di dalam penelitian ini. Penulis ingin meneliti dan mengungkapkan respon media terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS). Untuk itu penulis melakukan kajian penelitian dengan judul **“Respon Media Terbitan Medan Terhadap Berdirinya Republik Indonesia Serikat 1949-1950”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana respon media terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS)

1.3. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang akan dikaji maka perlu kiranya penulis membatasi permasalahan penelitian ini agar lebih memaksimalkan hasil penelitian yaitu respon media terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana respon media saat berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS), pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dilaksanakan, dan pada saat pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS)?
2. Bagaimana respon/tajuk media harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe* terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS)?
3. Bagaimana pendapat tokoh-tokoh dalam pemberitaan media?
4. Berapa jumlah berita mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dimuat dalam media?
5. Apakah berita mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi *headline*?
6. Apakah pendapat yang dimuat dalam media surat kabar dan majalah menolak, mendukung atau ambigu?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menelaah berbagai pemberitaan pada media harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe* mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS)
2. Mengetahui respon/tajuk media harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe* terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS)
3. Mengetahui pendapat tokoh masyarakat, baik tokoh lokal maupun nasional yang dimuat dalam media harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe*.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Untuk mengetahui berbagai tema pemberitaan pada media harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe* mengenai Republik Indonesia Serikat (RIS)
- b. Untuk mengetahui respon media dan pendapat tokoh-tokoh yang dimuat dalam media harian *Waspada*, dan majalah mingguan *Waktoe*
- c. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS), dan respon media terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS).

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang respon media terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS).